

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Penanganan Stunting di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jayadi

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: Jayadi0404brb@gmail.com

Keywords	Abstract
Gizi; Implementasi Kebijakan; Anggaran Desa; Intervensi Gizi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan stunting di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa. Meskipun proses perencanaan program telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024, penelitian ini menemukan bahwa implementasi di lapangan kurang optimal dari tujuan yang diharapkan. Hal ini berakar pada sumber daya yang dianggap tidak memadai, yang memicu penolakan dari para pelaksana. Sikap ini dieksekusi dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem komunikasi dan struktur birokrasi yang tidak terintegrasi, sehingga program hanya berjalan secara administratif untuk memenuhi pagu anggaran tanpa memberikan dampak dan efektivitas yang nyata. Faktor-faktor menghambat kurang optimalnya dari implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam penanganan stunting adalah sebagai (1) anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan stunting masih kurang (2) sumber daya manusia yang menjadi pelaksana penanganan stunting yang kurang profesional (3) sosialisasi yang masih kurang dan (4) komitmen pelaksana yang masih lemah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan (1) memprioritaskan anggaran, sehingga penanganan stunting dijadikan program utama APBDes melalui musdes dan rembuk stunting, mengoptimalkan dan berupaya mencari dana lain dengan mengkonvergensi program desa serta menggandeng pihak ketiga. (2) melaksanakan peningkatan kapasitas dan pendampingan dengan menyelenggarakan pelatihan rutin teknis berkelanjutan bagi kader. (3) memperluas sosialisasi dengan memanfaatkan semua media secara langsung, digital, forum desa dan sasaran yang beragam. (4) memperkuat komitmen kepemimpinan dengan melibatkan kepala desa dan seluruh perangkat serta lembaga desa dan memasukkan stunting dalam Perdes, lakukan monitoring dan evaluasi rutin oleh Pemerintah desa.
Keywords: Nutrient; Policy Implementation; Village	Abstract <i>This study aims to analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) policy in handling stunting in Paya</i>

<i>Budget; Nutrition Interventions</i>	<i>Besar Village, Batu Benawa District. Although the program planning process has been in accordance with Regent Regulation No. 7 of 2024, this study found that the implementation in the field was less than optimal than the expected goals. This is rooted in resources that are considered inadequate, which triggers rejection from the implementers. This attitude is executed by taking advantage of weaknesses in the communication system and an unintegrated bureaucratic structure, so that the program only runs administratively to meet the budget ceiling without having a real impact and effectiveness. The factors that hinder the sub-optimal implementation of the village revenue and expenditure budget (APBDes) policy in handling stunting are (1) the Village Expenditure Revenue (APBDes) budget in handling stunting is still lacking, (2) human resources who are implementers of stunting handling that are less professional, (3) there is still a lack of socialization, and (4) the commitment of implementers is still weak. Therefore, this study recommends (1) prioritizing the budget, so that stunting management is made the main program of the APBDes through musdes and stunting rembuk, optimizing and trying to find other funds by converging village programs and collaborating with third parties. (2) Carry out capacity building and mentoring by organizing continuous technical routine training for cadres. (3) Expand socialization by utilizing all media in direct ways, digital, village forums and various targets. by making materials that are easy to understand, practical, and visually appealing. (4) strengthening leadership commitment by involving the village head and all village apparatus and institutions and including stunting in the Perdes, conducting routine monitoring and evaluation by the village government.</i>
--	--



PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usia (Muslihin, Loita, Fauziah, Rahmadani, & Masturoh, 2025; Rumlah, 2022). Dampak stunting tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak, tetapi juga terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan (Amran, Pratama, & Wahyuni, 2025; Mu'tafi et al., 2024; Mulyana, 2025). Oleh karena itu, penurunan angka stunting menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, merupakan salah satu wilayah dengan angka stunting yang masih tergolong tinggi (Fatimah, 2025; Pusfita, Kustiawan, & Darmawan, 2024; Setyawan, Maghfiroh, Mustafa, & Andriani, n.d.). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, seperti sosialisasi gizi, pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan sanitasi (Ginting &

Zebua, 2024; Raesalat, Nurbudiwati, & Alawiyah, 2024; Rosha, Sari, Sp, Amaliah, & Utami, 2016). Namun, implementasi kebijakan di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, maupun tingkat partisipasi masyarakat (Agustin & Ayustia, 2024; Arsyad & Ahmad, 2024; Dinarwati & Nurfadilah, 2025; Yasmin et al., 2024).

Penelitian sebelumnya oleh Sari (2022) dan Fadillah (2023) banyak menyoroti implementasi APBDes dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Ahyaruddin & Ramadanis, 2019; Anggriani et al., 2023), tetapi belum mengkaji secara mendalam efektivitasnya terhadap percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Studi-studi terdahulu juga cenderung berfokus pada aspek administratif keuangan desa tanpa mengeksplorasi keterkaitan langsung antara alokasi anggaran dengan outcome kesehatan masyarakat, khususnya stunting (Puspaningrum, 2024). Padahal, penelitian empiris menunjukkan bahwa dana desa dan kapasitas aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting (Wahyudi et al., 2023; Indriana et al., 2024). Selain itu, kebijakan yang menekankan optimalisasi beberapa sumber pembiayaan desa untuk menurunkan stunting telah diangkat dalam laporan nasional yang mendorong kepala desa memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk percepatan penanganan stunting (Wardoyo, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan pada aspek integrasi kebijakan fiskal desa dan kesehatan masyarakat, dengan menganalisis sejauh mana APBDes berkontribusi dalam penanganan stunting di Desa Paya Besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting di tingkat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: Menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa. Secara implikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif dan terarah untuk program penurunan stunting. Selain itu, temuan penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa dalam mengoptimalkan peran APBDes untuk pembangunan kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat desa. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan peran dan keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan. Informan terdiri atas Kepala Desa, petugas

Puskesmas, bidan desa, kader Posyandu, serta perwakilan masyarakat yang memiliki anak balita. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan kredibilitas temuan. Secara etika, penelitian ini menjamin kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan partisipasi sebelum pengumpulan data dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan stunting di desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa dilihat dari tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Komunikasi

Sosialisasi mengenai program stunting telah dilakukan melalui kegiatan Posyandu dan pertemuan warga, tetapi belum merata menjangkau seluruh masyarakat. Informasi tentang pola gizi dan kesehatan ibu hamil masih sering disalahpahami, sehingga sebagian warga belum menerapkan perilaku gizi seimbang secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas komunikasi antar pihak pelaksana dan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kusnadi (2022) di Lombok Barat yang juga menunjukkan peran lemah komunikasi lintas sektor sebagai penghambat utama implementasi program stunting. Lemahnya komunikasi ini menjadi faktor dominan karena menyebabkan ketidaksinkronan antara perencanaan program di tingkat desa dengan pemahaman masyarakat di tingkat grassroots.

b. Sumber Daya

Keterbatasan tenaga kesehatan dan kader menjadi salah satu hambatan utama. Sebagian kader Posyandu belum memiliki pelatihan khusus tentang pencegahan stunting. Selain itu, sarana prasarana seperti alat pengukur antropometri dan fasilitas sanitasi masih terbatas. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah sudah ada, tetapi belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional. Keterbatasan sarana prasarana seperti alat pengukur antropometri dan fasilitas sanitasi yang memadai juga turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Rendahnya alokasi anggaran dan kapasitas SDM ini menjadi faktor krusial karena berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas intervensi gizi yang dapat dilakukan.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Secara umum, sikap dan komitmen para pelaksana di tingkat desa cukup baik. Kepala desa dan perangkatnya mendukung kegiatan pencegahan stunting, namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak keluarga belum rutin datang ke Posyandu atau pemeriksaan gizi anak, karena kurangnya kesadaran dan masih adanya pandangan tradisional terkait pola asuh dan makanan. Hanya 40% balita yang rutin ditimbang setiap bulan di Posyandu, dan 35% ibu hamil yang secara konsisten mengonsumsi tablet tambah darah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh masih kuatnya pandangan tradisional terkait pola asuh dan makanan, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini.

d. Struktur Birokrasi

Struktur pelaksanaan program sudah terbentuk melalui kerja sama antara pemerintah desa, Puskesmas, dan lembaga masyarakat. Namun, mekanisme koordinasi antar sektor masih

lemah. Beberapa kegiatan berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat antar bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Akibatnya, efektivitas kebijakan belum mencapai hasil maksimal. Namun, mekanisme koordinasi antar sektor masih lemah. Berdasarkan hasil wawancara, 60% kegiatan berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat antar bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Akibatnya, efektivitas kebijakan belum mencapai hasil maksimal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Febriani (2023) yang menyatakan bahwa fragmentasi struktur birokrasi menjadi kendala utama dalam penanganan stunting terintegrasi.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya merupakan penghambat paling dominan dalam implementasi kebijakan APBDes untuk penanganan stunting di Desa Paya Besar. Lemahnya komunikasi menyebabkan program tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, sementara keterbatasan sumber daya membatasi cakupan dan kualitas intervensi. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memperparah kondisi, dimana anggaran yang terbatas menyebabkan sosialisasi tidak optimal, dan sosialisasi yang tidak optimal membuat program tidak berjalan efektif meskipun dengan anggaran yang terbatas. Hal ini menjelaskan mengapa program penanganan stunting di Desa Paya Besar belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Paya Besar telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional melalui berbagai program intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala pada aspek sumber daya, komunikasi, dan koordinasi antar pelaksana di tingkat desa. Dilihat dari model implementasi kebijakan George C. Edward III, keempat aspek utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berfungsi secara optimal. Komunikasi program belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, sumber daya manusia dan sarana masih terbatas, serta koordinasi antar sektor belum berjalan terpadu. Meskipun demikian, komitmen pemerintah desa dan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Paya Besar masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas pelaksana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pencegahan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., & Ayustia, R. (2024). Tantangan dan peluang dalam implementasi program desa membangun Desa Sugi Waras. *Masyarakat Demokrasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 17–26.*
- Ahmad, M., Khan, M. E., & Ahmad, S. (2020). Assessing potable water quality and identifying areas of waterborne diarrheal and fluorosis health risks using spatial interpolation in Peshawar, Pakistan. *Environmental Challenges*, 1, 100001. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2020.100001>
- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*,

- 9(1), 110–118. <https://doi.org/10.37859/jae.v9i1.1344>
- Amran, R., Pratama, R. R., & Wahyuni, S. (2025). Stunting sebagai ancaman kualitas sumber daya manusia: Perspektif gizi, lingkungan, dan sosial. *Scientific Journal*, 4(4), 233–240.*
- Anggriani, N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2023). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.020219>
- Arsyad, S. N. S., & Ahmad, B. (2024). Dinamika kebijakan dan implementasi program Desa Maju: Studi literatur dan rekomendasi kebijakan. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 285–295.*
- Dinarwati, S., & Nurfadilah, Y. M. (2025). Analisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program penanganan stunting di wilayah perdesaan (studi terapan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang). *The World of Public Administration Journal*.
- Fatimah, D. (2025). Efektivitas program percepatan penurunan stunting di Desa Paluhakan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 14(1), 75–83.*
- Ginting, T. T. M., & Zebua, A. (2024). Sosialisasi pencegahan stunting di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun: Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(1), 27–31.*
- Indriana, I. S., Hartarto, R. B., & Nugraha, G. A. (2024). The role of village development on stunting prevalence reduction in Eastern Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.22099>
- Mu'tafi, A., Firdaus, Z., Romadhona, F., Mubarak, I. S., Agung, A. H., Wahyuni, A. N., Larasati, R., Nurhidayat, Y. K. H., Ma'arif, S., & Aufa, A. (2024). Membangun generasi cerdas di Desa Binangun: Menuju masa depan gemilang dengan gizi seimbang dan bebas stunting. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 589–597.*
- Mulyana, A. (2025). Implikasi stunting terhadap kemampuan kognitif dan fisik anak usia dini di TK At-Taqwa Teta Lambitu. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 122–133.*
- Muslihin, H. Y., Loita, A., Fauziah, Y., Rahmadani, N., & Masturoh, S. (2025). Deteksi dini gizi kurang dan risiko gagal tumbuh: Urgensi pemantauan rutin di usia golden age. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(3), 378–389.*
- Pusfita, D., Kustiawan, K., & Darmawan, E. (2024). Peran pemerintah desa terhadap penanganan stunting di Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai tahun 2021–2023. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Puspaningrum, N. A. (2024). Village fund management for health programs to reduce stunting: A qualitative study of Pundungan Village, Juwiring Subdistrict, Klaten Regency. *Jurnal Prajaiswara*, 6(1). <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i1.163>
- Raesalat, R., Nurbudiwati, N., & Alawiyah, M. D. (2024). Strategi pemerintah desa dalam pencegahan stunting melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) Toss di Desa Jangkurang Kecamatan Leles. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1),

- 1–13.*
- Rosha, B. C. H., Sari, K., Sp, I. Y., Amaliah, N., & Utami, N. H. (2016). Peran intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam perbaikan masalah gizi balita di Kota Bogor. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2), 127–138.*
- Rumlah, S. (2022). Masalah sosial dan solusi dalam menghadapi fenomena stunting pada anak. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 1(3), 83–91.*
- Setyawan, A. D., Maghfiroh, A. M., Mustafa, I. R., & Andriani, S. P. (n.d.). Fenomena stunting di Desa Tulungrejo Kota Batu pada tahun 2010–2019. *Malang Raya dalam Kajian Sejarah Tematis*, 224.*
- Wardoyo, H. (2023, April 12). Optimize four funding sources to tackle stunting, village heads told. *ANTARA News*. <https://en.antaranews.com/news/278565/optimize-four-funding-sources-to-tackle-stunting-village-heads-told>
- Wahyudi, A., & Colleagues. (2023). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *International Journal for Equity in Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-023-02093-5>
- Yasmin, A. N., Aldilla, V. A., Riani, P. B., Mulyawarman, M. K., Alfiani, S., & Mubarok, A. (2024). Peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan. *Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 60–68.*